

ABSTRAKSI

Konsili Vatikan II (1962-1965) membarui Gereja secara fundamental baik dalam pastoral maupun teologi menyangkut posisi dan kehadiran Gereja dalam masyarakat. Hubungan Gereja dan negara dilihat sebagai salah satu kasus dalam keseluruhan hubungan antara Gereja dan dunia. Hubungan antara Gereja dan dunia pertama-tama adalah hubungan antara dua pola dalam hidup orang Kristen sendiri, yakni hubungan antara hidupnya sebagai dunia dan hidupnya sebagai Gereja. Hubungan orang beriman dengan kehidupan bersama dalam negara adalah hubungan orang beriman dalam tanggung jawab moral dan sosial. Gereja sebagai komunitas berarti jaringan orang yang menghayati iman kristiani, dalam ungkapan gerejani seperti juga dalam tanggung jawab moral dan sosial mereka. Fungsi jaringan adalah mendorong keterlibatan dalam hidup sekuler anggota supaya iman bersama mendapat wujud nyata dalam hidup aktual sekarang ini. Aktivitas sosial Gereja adalah keterlibatan, yaitu ikut serta dalam perjuangan sosial agar benar-benar terlaksana hidup dan iman manusia. Dalam kebersamaan bernegara, keterlibatan orang beriman adalah mencipta *bonum commune*.

Gereja dan negara melayani panggilan manusia yang sama. Gereja adalah tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia, yaitu sarana agar orang dapat mengungkapkan relasinya dengan Allah yang telah memanggil manusia. Namun, tugas dan wewenang Gereja ini tidak boleh dipandang sama seperti (atau disamakan dengan) tugas dan wewenang suatu negara. Gereja berkepentingan bahwa dalam struktur negara setiap orang mendapat kelonggaran untuk menjalankan keterlibatan politiknya, agar relasi manusia dengan Allah sebenarnya terwujud. Negara berkepentingan supaya relasi dengan Allah yang diungkapkan dalam Gereja itu tidak mengasingkan orang dari tugasnya yang sosial dan politik dan tidak membuat orang cuci tangan dari hidup bersama, melainkan mendorong untuk memikul tanggung jawab dalam hidup kenegaraan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Prinsip dasar bagi keterlibatan sosial Gereja adalah: pada dasarnya pelayanan Gereja terletak pada bidang religius; pelayanan religius Gereja pada dirinya demi Kerajaan Allah; demi kepentingan Gereja di bidang religius inilah, Gereja menyumbang empat tanggung jawab sosial politik, yakni melindungi martabat manusia, memajukan hak asasi manusia, memperkuat kesatuan keluarga manusia dan meneguhkan makna dari setiap kegiatan manusia. Penempatan pembelaan terhadap pribadi manusia di pusat eklesiologi Katolik memindahkan keterlibatan sosial dari pinggiran ke pusat hidup dan karya Gereja. Konsili dan perkembangan sesudahnya meneguhkan Gereja lokal sebagai pelaku sosial.

Para uskup Indonesia menyatakan kemantapan hati umat Katolik di Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat mencipta *bonum commune*, dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Umat awam menjalankan fungsi menguduskan dunia, yakni berbagi hidup ilahi dalam hidup manusia, dengan keterlibatan mengupayakan hidup yang lebih manusiawi bersama umat manusia seluruhnya. Keterlibatan politik umat awam menampilkan wajah sosial dan politik Gereja, karena hidup mereka adalah sebagai dunia dan sebagai Gereja.

ABSTRACT

The second Vatican Council (1962-1965) fundamentally renew the Church both in pastoral and theological concerns of the Church's position and presence in the community. The relationship of the Church and the state is seen as one of the cases in the overall relationship between the Church and the world. The relationship between the Church and the world is the relationship between the two patterns in the Christian life itself, namely the relationship between her life as a world and her life as the Church. The relationship between the believers and the common life in the state is the relationship of the believers in moral and social responsibility. The Church as a community means a network of people who appreciate their faith, the ecclesiastical expression as well as their social and moral responsibility. The function of the network is to encourage the involvement of the members in secular life in order to get the real form of faith in today's actual life. The social activities of the Church is involvement, namely, participating in social struggles in order to truly accomplish human life and faith. The involvement of believers in the state is to create *bonum commune*.

The Church and the state serve the same human calls. The Church is at once a sign and a safeguard of the transcendent character of human person, by which people express their relationship with God who has called human. However, the Church, based on her role and competence, is not identified in any way with the political community nor bound to any political system. In the structure of state, Church concerns that everyone has leeway to run his political involvement so that the human relationship with God is actually manifested. The state concerns that the relationship with God revealed in the Church does not alienate people from the social and political task nor make people pushed aside from living together, but rather is encouraged to take responsibility in life in the state.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

The basic principle of the Church's social engagement is that the ministry of the Church is religious in origin and her purpose; the primary objective of the religious ministry is serving the reign of God; as the Church pursues its religious ministry, it should contribute to four objectives which have direct social and political consequences, namely protecting human dignity, promoting human rights, cultivating the unity of the human family and contributing a sense of meaning to every aspect of human activity. The placement of defense against human at the center of Catholic ecclesiology moves social involvement from the periphery to the center of life and the work of the Church. The second Vatican Council strengthens the local Church as social actors.

The Indonesian bishops declare that Catholics in Indonesia is an integral part of the Indonesian nation, and so is committed to contribute community in creating *bonum commune*, and hold the Pancasila and the Constitution of 1945. Laity (people) consecrate the world, sharing the divinity in human life, by participating in seeking a humane living with the entire human race. Political involvement of lay people shows the social and political face of the Church, because their lives are as the world and the Church.